

ANALISIS WACANA KRITIS PADA TAJUK (ANTI) KORUPSI DI SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA

Hari Bakti Mardikantoro
FBS Universitas Negeri Semarang
e-mail: haribaktim@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan sikap dan pandangan surat kabar terhadap kasus korupsi di Indonesia yang diwujudkan dalam wacana tajuk (anti) korupsi. Sikap surat kabar diwujudkan melalui dua bingkai, yakni bingkai mengkritisi berita korupsi dan bingkai mendukung berita korupsi. Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode pustaka dan metode simak. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode padan dan metode partisipatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, *Koran Tempo* dalam dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejanggalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk bui. Kedua, dengan bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar *Kompas*, *Republika*, *Koran Tempo*, *Jawa Pos*, dan *Suara Merdeka* memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor.

Kata kunci: analisis wacana kritis, wacana tajuk, bingkai

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF (ANTI)-CORRUPTION EDITORIALS IN INDONESIAN NEWSPAPERS

Abstract

This study aims to describe newspaper attitudes towards and views of corruption cases in Indonesia, manifested in (anti-)corruption editorials. Newspaper attitudes are manifested through two frames, namely the one criticizing corruption news and the other supporting corruption news. The data were collected through a literature review and a recording method. They were analyzed by the correspondence and participatory methods. The findings are as follows. First, by criticizing corruption news, *Koran Tempo* in its two editorials indicates a disagreement over corruption news. The disagreement is caused by several weird facts in the court and the defense for the corruption investigator who, quite the contrary, was sent to prison. Second, with a frame of supporting corruption news, *Kompas*, *Republika*, *Koran Tempo*, *Jawa Pos*, and *Suara Merdeka* have attitudes and views indicating agreement to support corruption news in newspapers. The support refers to efforts to eradicate corruption that can be manifested in the arrest of a suspect in corruption, the court, and the verdict on a suspect in corruption.

Keywords: critical discourse analysis, editorials, frames

PENDAHULUAN

Bahasa memang memiliki fungsi informatif, selain fungsi ekspresif, direktif, estetis, dan fatis. Bahkan fungsi informatif tersebut, yakni bahasa sebagai alat penyampai informasi oleh Leech (1997:47) dianggap sebagai fungsi utama. Oleh karena bahasa juga digunakan dalam dunia pers, maka fungsi pers yang paling awal dan terutama juga sebagai penyampai informasi. Meskipun demikian, saat ini pers mempunyai fungsi yang luas, tidak sekadar untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Bahkan sekarang ini, dalam era globalisasi, informasi justru sudah menjadi komoditas ekonomi, sosial, dan politik yang terus diburu orang. Maka kemudian berlakulah premis *information is power* (Subrata, 1997:70). Demikian pentingnya informasi, maka surat kabar yang memuat paling banyak informasi ternyata lebih diminati pembaca. Hal ini terbukti dari data yang disampaikan Subrata (1997:67) bahwa surat kabar harian ternyata paling diminati pembaca dibandingkan surat kabar jenis lainnya.

Surat kabar lazimnya memang menyampaikan informasi/berita yang aktual kepada para pembaca. Meskipun demikian, di dalam keseragaman seperti ini bukan berarti tidak terdapat keberagaman. Di dalam surat kabar, kita akan menjumpai berbagai macam jenis tulisan. Tulisan yang paling menonjol memang tulisan yang mengemukakan informasi/berita. Akan tetapi, di sisi lain, ada pula tulisan khas seperti opini, tajuk, rubrik, kolom, pojok dan jenis tulisan lainnya.

Tiap-tiap bagian dalam surat kabar memunculkan wacana yang khas dan masing-masing berbeda dengan wacana dalam bagian yang lain. Dengan demikian, dalam suatu surat kabar terdapat berbagai macam wacana, seperti wacana berita, wacana iklan, wacana tajuk, wacana pojok, dan lain sebagainya. Masing-masing wacana tersebut tentunya berisi

suatu topik tertentu. Yang dimaksud topik adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana (Poedjosoedarmo dalam Baryadi 2002:54). Hal ini berarti topik menjiwai seluruh bagian wacana.

Setiap surat kabar tentu memunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana adalah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu. Dengan membaca tajuk, bisa dipahami sikap dan pandangan surat kabar tersebut tentang suatu topik tertentu.

Salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat menjadi berita utama adalah korupsi. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak pernah ada akhirnya. Bahkan survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh *World Justice Project* menyebutkan, praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Apabila diurutkan, Indonesia berada di posisi bawah, baik secara regional maupun secara global. Survei dilakukan dengan melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli. Dalam hal ketiadaan korupsi, Indonesia mendapatkan skor 0,46 atau berada di urutan 47 dari 65 negara. Jika dilihat dari sisi kawasan regional, Indonesia merupakan negara tersubur korupsinya di antara negara-negara di Asia Tenggara (Suara Merdeka, 15 Juni 2011). Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menemui jalan buntu. Penguasaan harta secara tidak sah oleh seseorang atau sekelompok orang di Indonesia memang menjadi magnet dalam memperkaya diri. Dengan demikian, surat kabar pun akan secara signifikan menginformasikan masalah tersebut kepada pembaca.

Penelitian ini tentang analisis secara kritis pada wacana tajuk (anti) korupsi di

surat kabar berbahasa Indonesia. Wacana tajuk (anti) korupsi dipilih karena tajuk surat kabar merupakan manifestasi sikap dan ideologi surat kabar tersebut mengenai korupsi dan penanggulangannya di Indonesia. Ideologi yang dimaksud di sini bukanlah ideologi yang dimaksud Foucault (1997) sebagai *will to power* 'hasrat untuk berkuasa', melainkan dalam pengertian yang netral, yakni *worldview* 'pandangan tentang dunia' atau ideologi dalam arti semiotik, yakni titik tolak untuk melakukan produksi dan interpretasi pesan atau nilai moral suatu simbol yang oleh Roland Barthes disebut mitologi (Hamad, 2004:20).

Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan sebuah teks (realitas sosial) yang dikaji oleh seseorang atau sekelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan (Darma, 2009:49). Selain itu, pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai *power* (Asher dan Simpson, 1994:940). Adapun Renkema (2004:282) memandang wacana sebagai cerminan dari suatu relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Analisis wacana kritis dalam tajuk yang berisi topik (anti) korupsi) menarik dilakukan karena analisis ini merupakan upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Jadi, wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi (Darma 2009:49). Oleh karena itu, dalam analisis ini diperlukan bingkai. Gagasan tentang bingkai

diterapkan untuk menganalisis wacana media. Analisis bingkai secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto 2002:3).

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak semata-mata dipahami sebagai studi bahasa, melainkan dipahami sebagai suatu bentuk praktik sosial (Fairclough dan Wodak dalam Subagyo, 2010:177). Dalam praktik sosial, seseorang selalu memiliki tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal itu terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial pria dan wanita atau kelompok mayoritas dan minoritas (Subagyo, 2010:177). Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak semata-mata mengkaji wacana dari segi internal dan eksternal, tetapi dapat dianggap sebagai 'jendela' untuk melihat motif-motif ideologis dan kepentingan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Meskipun demikian, pada akhirnya memang analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis dalam analisis wacana kritis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian studi linguistik tradisional. Bahasa yang dianalisis oleh wacana kritis bukan menggambarkan aspek bahasa saja, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Sementara itu, tajuk atau secara langkap tajuk rencana atau editorial dipahami sebagai sebuah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu (Subagyo, 2012:6). Tajuk menjadi ungkapan keteguhan dan keyakinan redaksi atau

pengelola surat kabar (Santana, 2005:64). Keteguhan dan keyakinan yang dimaksud mengenai isu-isu potensial, fenomenal, aktual, dan atau kontroversial dalam masyarakat.

Tajuk memiliki tiga bagian fundamental, yakni *lead*, *follow*, dan *valuate* yang berwujud kalimat atau kumpulan kalimat (Bolivar, 1994:280). Ketiga bagian itu membentuk kesatuan dengan fungsi yang berbeda-beda. *Lead* berfungsi untuk mengantarkan permasalahan, *follow* berfungsi untuk merespons bagian sebelumnya sekaligus untuk mempertahankan topik, sedangkan *valuate* berfungsi untuk mengungkapkan penilaian atas informasi pada bagian sebelumnya.

Dalam hal bahasa, tajuk cenderung ditulis menggunakan bahasa resmi, baku, dan serius (Koesworo, Margantoro, dan Viko, 1994:110). Dalam tajuk dimungkinkan terjadi perpaduan antara ragam jurnalistik (berkadar kepolosan), dengan ragam filosofik (berkadar kearifan), ragam akademik (berkedar kejernihan), dan ragam literer (berkadar kepakaan) (Sudaryanto, 1997:47).

METODE

Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. Penekatan ini menempatkan wacana sebagai *power* (kekuasaan) (Asher dan Simpson 1994:940) atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seseorang selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas.

Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber

tertulis untuk memperoleh data (Subroto 1992:42). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode simak (Sudaryanto 1993: 5) dan dilanjutkan dengan teknik catat. Dalam hal ini, peneliti mengamati setiap rubrik tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Adapun data penelitian berupa penggalan wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Surat kabar yang dijadikan sumber data fisik berupa tiga surat kabar nasional, yaitu *Kompas*, *Republika*, dan *Tempo*, serta dua surat kabar yang terbit di daerah, yaitu *Jawa Pos* dan *Suara Merdeka*. Pemilihan surat kabar tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan surat kabar nasional yang terbit di Ibu Kota dan surat kabar regional yang terbit di daerah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Penggunaan metode yang lebih dari satu ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang akan diungkap. Adapun metode yang digunakan adalah metode padan dan metode partisipatif. Metode yang digunakan dalam rangka mengurai konteks wacana (anti) korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia adalah metode padan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pragmatis. Sementara itu, untuk mengungkap sikap surat kabar terhadap pemahaman korupsi di Indonesia digunakan metode partisipatif, yaitu metode yang mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Dalam hal ini, setiap pertuturan atau penggunaan wacana selalu diasumsikan ada penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, peneliti menempatkan diri sebagai penerima tutur yang menafsirkan wacana tajuk dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu masalah penting yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini adalah masalah korupsi. Masalah korupsi adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, dalam hal pencegahan dan pemberantasan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu elemen masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan masalah korupsi dan bentuk pencegahannya adalah surat kabar. Ketika ada peristiwa korupsi di Indonesia, surat kabarliah yang menjadi media terdepan dalam memberitakan. Di samping itu, surat kabar juga akan mengambil sikap terhadap peristiwa korupsi tersebut. Sikap suatu surat kabar terhadap korupsi di Indonesia akan ditulis dalam tajuk. Oleh karena itu, tajuk bisa digunakan untuk mengukur kadar keberpihakan atau sebaliknya suatu surat kabar terhadap masalah korupsi di Indonesia.

Pada bagian ini akan dipaparkan analisis wacana kritis terhadap tajuk (anti) korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia. Analisis ini meliputi dua hal, yakni dengan bingkai mengkritisi berita korupsi di surat kabar dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dalam praktik media massa, bingkai merupakan transformasi ideologi, visi, atau keberpihakan institusi media yang sangat kelihatan terungkap dalam struktur dan penggunaan bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada wacana tajuk (Subagyo, 2012).

Bingkai Mengkritisi Berita Korupsi

Yang dimaksud bingkai mengkritisi berita korupsi adalah suatu sikap dan pandangan surat kabar yang tidak setuju terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Ketidaksetujuan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data

ditemukan tajuk dengan bingkai mengkritisi berita korupsi. Data yang dapat diamati:

- (1) Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bersalah Indar Atmanto mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), beserta PT Indosat, induk usaha IM2 sungguh tidak masuk akal.
- (2) Sepintas lalu saja bisa diketahui bahwa tuduhan atas Heru itu dicari-cari. Heru justru dibidik karena menemukan pelbagai kegagalan proyek militer.

Data (1) dan (2) merupakan penggalan wacana dalam tajuk pada *Koran Tempo*. Kalau dicermati kedua data tersebut, ada sikap *Koran Tempo* yang mengkritisi berita dugaan kasus korupsi yang dimuat di surat kabar. Dalam data (1), *Koran Tempo* menunjukkan sikap yang mengkritisi berita persidangan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2). Hal itu ditunjukkan dengan penggalan wacana *vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bersalah Indar Atmanto mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), beserta PT Indosat, induk usaha IM2 sungguh tidak masuk akal*. Penggunaan frase *sungguh tidak masuk akal* dalam tajuk itu menunjukkan sikap bahwa *Koran Tempo* tidak setuju dengan vonis yang telah dijatuhkan terhadap tersangka koruptor Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2). Sikap ini tentu ada latar belakangnya. Mengapa *Koran Tempo* mempunyai sikap seperti itu? Hal ini disebabkan oleh bingkai yang dipakai oleh *Koran Tempo*, yakni mengkritisi berita korupsi yang ada di surat kabar. Bingkai itu sebagai dasar dalam menyikapi berita kasus korupsi.

Bingkai yang dipakai oleh *Koran Tempo* adalah sejumlah fakta kegagalan dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) yang ditemukan pada berita lain

dalam koran tersebut. Sejumlah kejanggalan antara lain (1) hasil audit BPKP telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, (2) terjadinya perubahan isi dakwaan jaksa ketika proses persidangan telah berlangsung, bahkan jaksa mengubah dakwaan ketika siding memasuki tahap pembacaan tuntutan, dan (3) tuduhan jaksa mengada-ada.

Sementara itu, dalam data (2) redaktur *Koran Tempo* mengkritisi berita dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Heru Sukrisno yang semula mengaudit dan menemukan dugaan proyek fiktif pengadaan pesawat Fokker F-50 yang merugikan Negara Rp 17,8 miliar. Sebagai pengusut kasus korupsi, ia justru masuk bui karena lupa mengembalikan dokumen sigi. Ketidaksetujuan *Koran Tempo* terhadap vonis korupsi yang dijatuhkan pada Brigadir Jenderal Heru Sukrisno dimunculkan dalam tajuk dengan judul "Mengusut Korupsi Berujung Bui".

Koran Tempo mempunyai sikap tidak setuju terhadap vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer Jakarta terhadap pengusut kasus korupsi bernama Brigadir Jenderal Heru Sukrisno tentu ada latar belakangnya. Menurut *Koran Tempo* vonis tersebut terlalu dicari-cari. Markas Besar TNI Angkatan Darat gerah dengan temuan Brigadir Jenderal Heru Sukrisno, sehingga dicari alasan untuk menutup kasus tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah tuduhan terhadap pengusut kasus korupsi. Tuduhan tersebut meliputi pembocoran dokumen, mekipun gagal; tuduhan tidak mengembalikan dokumen audit pengadaan Fokker. Tuduhan terakhir inilah yang kemudian menjerat Brigadir Jenderal Heru Sukrisno masuk bui

Bingkai Mendukung Berita Korupsi

Yang dimaksud bingkai mendukung berita korupsi adalah suatu sikap dan

pandangan surat kabar yang setuju dan mendukung terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mendukung berita korupsi. Data yang dapat diamati:

- (3) Jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja.
- (4) Uang tersebut merupakan *jatah* untuk Nazaruddin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai Rp 196,8 miliar.

Data (3) dan (4) merupakan penggalan wacana (anti) korupsi pada editorial surat kabar berbahasa Indonesia. Kebetulan ketiga data tersebut dimuat di *Koran Tempo* pada tanggal 3 Juni dan 4 Juni 2013 dengan judul editorial *Kasus Duit untu Senayan dan Kongkalikong di Kementerian Pendidikan*.

Pada data (3) terdapat kalimat *jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja*. Secara struktural, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah kepada KPK untuk tidak berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja. Namun di balik kalimat perintah tersebut, redaktur *Koran Tempo* tentu mempunyai alasan mengapa muncul kalimat tersebut. Redaktur *Tempo* dan kita semua sebagai warga Negara Indonesia tentu sudah sangat paham bahwa korupsi di Indonesia sering dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak. Demikian pula korupsi simulator kemudi yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Di balik kalimat perintah tersebut, penulis editorial pada *Koran Tempo*

menduga ada pihak lain yang diduga terlibat dalam korupsi simulator kemudi.

Data (4) mengungkapkan kalimat berita yang memberitakan bahwa ada sejumlah uang yang diserahkan untuk Nazaruddin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai Rp 196,8 miliar. Namun kalau dianalisis secara mendalam apa yang ada di balik kalimat tersebut bahwa uang sebesar Rp 196,8 milyar merupakan jatah Nazaruddin dan teman-temannya. Kata *jatah* berarti jumlah atau banyaknya barang dan sebagainya (termasuk uang) yang telah ditentukan (untuk suatu maksud atau untuk suatu daerah). Dalam konteks data (4) tersebut penulis menggunakan kata *jatah* karena penulis beranggapan bahwa penyetoran untuk Nazaruddin dan teman-temannya dilakukan secara teratur dan periodik dengan jumlah tertentu, sehingga kalau dijumlahkan bisa mencapai Rp 196,8 milyar, jumlah uang yang tidak sedikit. Jumlah uang sebesar itu diberikan secara teratur dengan jumlah tertentu dalam jangka tertentu. Dengan demikian, korupsi simulator kemudi sudah dilakukan cukup lama dan melibatkan banyak pihak.

Data lain :

- (5) Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Modus Nazar belum berubah. Ia disebut-sebut berada di belakang sederet perusahaan baru yang “berbelanja anggaran” ke Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Ada alasan mengapa KPK hanya kebagian dua kasus Nazaruddin. Rupanya Kejaksaan Agung dan Kepolisian lebih dulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) untuk kasus-kasus korupsi Nazaruddin. Begitu penyelidikan mereka dimulai, KPK tak punya pilihan selain memberi jalan.

Data (5) s.d (7) merupakan penggalan wacana yang terdapat dalam editorial surat kabar berbahasa Indonesia. Ketiga penggalan wacana tersebut merupakan bagian dari wacana editorial yang berjudul *Kongkalikong di Kementerian Pendidikan, Setengah Hati Mengusut Nazar, dan Jangan Lupakan Nazaruddin*. Secara struktural, ketiga penggalan wacana tersebut merupakan kalimat-kalimat berita. Pada data (5) terdapat kalimat berita *Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Kalimat tersebut hanya menginformasikan bahwa ada seseorang bernama Wiendu Nuryanti yang telah melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan membaca kalimat tersebut, pembaca hanya sekadar memperoleh informasi tersebut. Namun kalau kita analisis lebih mendalam berkaitan dengan apa yang ada di balik kalimat berita tersebut akan muncul suatu pemahaman bahwa kalimat tersebut tidak sekadar menginformasikan saja. Hal ini bisa dicermati dengan penggunaan klausa *membawa gerbong bisnisnya*. Dalam konteks tersebut, Wiendu Nuryanti berperan sebagai masinis yang tentu akan mengarahkan gerbong bisnisnya sesuai kemauan dia. Gerbong adalah bagian ketera api tempat untuk penumpang dan biasanya kereta api akan membawa banyak gerbong. Gerbong bisnis yang ingin disampaikan oleh penulis editorial tersebut adalah gerbong yang berisi banyak kepentingan bisnis pribadi Wiendu Nuryanti untuk mencari keuntungan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerbong yang biasanya penuh dengan orang, dalam konteks ini penuh dengan kepentingan bisnis pribadi dengan maksud untuk makin banyak mendapat keuntungan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada data (6) terdapat penggalan wacana *Modus Nazar belum berubah. Ia disebut-sebut berada di belakang sederet perusahaan*

baru yang “berbelanja anggaran” ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pandangan penulis, penggalan wacana tersebut tidak sekadar memberitahu bahwa modus yang digunakan Nazaruddin belum berubah. Namun penulis ingin menyampaikan lebih dari sekadar memberitahu. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan klusa *berbelanja anggaran* untuk menggambarkan betapa sepak terjang Nazaruddin sudah sangat meresahkan. Dalam kata *berbelanja*, ada aspek makna jual beli. Artinya Nazaruddin dengan segala kelecikannya menggunakan kesempatan untuk masuk dan melibatkan anggota DPR dalam kasus ini. Anggaran negara yang mestinya untuk kepentingan rakyat oleh Nazaruddin bisa ‘dibeli’ dan tentunya ada imbalan tertentu yang masuk ke para anggota DPR, sehingga dengan berbelanja anggaran tersebut Nazaruddin bisa mengatur anggaran yang akan disyagkan oleh para anggota DPR.

Sementara itu dalam data (7) terdapat penggalan wacana *Ada alasan mengapa KPK hanya sebagian dua kasus Nazaruddin. Rupanya Kejaksaan Agung dan Kepolisian lebih dulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) untuk kasus-kasus korupsi Nazaruddin. Begitu penyelidikan mereka dimulai, KPK tak punya pilihan selain memberi jalan.* Dalam penggalan wacana tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum. Mereka berusaha untuk saling menyelamatkan instusinya masing-masing. Oleh karena itu, dua aparat penegak hukum berupaya mengambil alih kasus ini supaya bisa sedikit ‘menutupi’ aib institusinya dan berusaha untuk tidak melibatkan unsur pimpinan atau anggota pada kedua penegak hukum tersebut. Dengan demikian, seakan-akan terjadi perebutan kewenangan dalam menangani kasus ini antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung di satu sisi dengan

KPK di sisi yang lain. Kedua penegak hukum tersebut berusaha untuk menjauhkan kasus ini dengan KPK, padahal yang justru berwenang menangani kasus ini adalah KPK yang merupakan lembaga independen dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

- (8) PKS sebagai partai yang mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan seharusnya mendukung penuh langkah KPK, bukan malah menghambat atau menghalang-halangi. Jika masyarakat menilai suatu partai konsisten atau tidak antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, maka penilaian itu akan diwujudkan sebagai sikap dalam pemilihan Umum 2014.
- (9) Fathonah, juga sebelum ini Nazaruddin dan Gayus menciptakan kekuatan di lingkaran kekuasaan tertentu sebagai ‘pengatur’. Entah bermodal bakat kekuatan lobi, atau kemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan banyak pihak, maka orang-orang itu bisa menjadi episentrum yang mencaloikan kebutuhan-kebutuhan orang atau kelompok tertentu.
- (10) Defensivitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas penanganan kasus dugaan suap dalam kebijakan impor daging sapi merupakan reaksi alamiah yang bisa dipamahami. Namun menuding langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “festival” seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Fachri Hamzah jelas tidak rasional dan sangat gegabah.

Data (8) s.d (10) merupakan penggalan wacana editorial pada rubrik tajuk. Ketiga editorial tersebut diberi judul *Mind Game” Korupsi Politik, Kekuasaan di Tangan Calo, dan KPK Tak Akan Sembarangan.* Dalam ketiga data tersebut terdapat permasalahan yang hampir sama. Ada benang merah yang bisa ditarik dari ketiga penggalan wacana tersebut, yakni permasalahan

Presiden PKS yang diduga terlibat korupsi impor daging sapi. Ketiga penggalan wacana tersebut berisi kalimat-kalimat berita yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang permasalahan yang sedang ditulis. Namun di balik kalimat-kalimat berita tersebut ada sesuatu yang menarik yang perlu dicermati.

Pada data (8) penulis ingin menyampaikan dukungannya terhadap KPK yang sedang menangani kasus dugaan korupsi impor daging sapi ini. Bahkan penulis meminta kepada PKS untuk mendukung KPK dalam menangani kasus yang menimpa presidennya bukan justru menentangnya. Hal ini terlihat dari kalimat *PKS sebagai partai yang mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan seharusnya mendukung penuh langkah KPK, bukan malah menghambat atau menghalang-halangi*. Bahkan penulis mempunyai keyakinan, partai yang tidak sesuai antara yang sikap dengan perbuatannya akan ditinggalkan pemilihnya.

Adapun dalam data (9) dibicarakan kekuatan orang-orang tertentu dalam lingkaran kekuasaan di negeri ini. Orang yang dimaksud adalah Fathonah, Nazaruddin, dan Gayus Tambunan. Kalimat yang mendukung pernyataan tersebut adalah *Fathonah, juga sebelum ini Nazaruddin dan Gayus menciptakan kekuatan di lingkaran kekuasaan tertentu sebagai 'pengatur'*. Penulis ingin menyampaikan bahwa yang justru mengatur segala kepentingan di Indonesia ini adalah uang yang kebetulan dimiliki oleh ketiga orang tersebut. Dengan uang yang dimiliki, Fathonah, Nazaruddin, dan Gayus Tambunan bisa menjadi raja dan mengatur orang-orang yang rakus harta dan kekuasaan.

Sementara itu data (10) juga masih membicarakan dugaan kasus korupsi impor daging sapi yang dilakukan oleh Presiden PKS. Sekali lagi, penulis editorial tersebut mendukung langkah KPK dalam menangani kasus ini. Penulis dalam tajuknya menulis *Defensivitas Partai*

Keadilan Sejahtera (PKS) atas penanganan kasus dugaan suap dalam kebijakan impor daging sapi merupakan reaksi alamiah yang bisa dipahami. Namun menuding langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai "festival" seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Fachri Hamzah jelas tidak rasional dan sangat gegabah. Bahkan surat kabar memberi judul tajuk tersebut adalah *KPK Tak Akan Sembarangan*.

Data lain :

(11) Status kepolisian sebagai lembaga terkorup disusul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengadilan. Sementara Polri menanggapi dengan permintaan maaf, DPR terkesan meradang. Kedua respons itu sama-sama tidak cukup karena hasil survei tersebut pastilah tidak untuk diperdebatkan kesahihannya.

Data (11) merupakan penggalan wacana (anti) korupsi pada editorial surat kabar dengan judul *Langkah Radikal terhadap Lembaga Korup dan Merosotnya Kepercayaan Publik*. Dalam data (11) terdapat kalimat yang merupakan sikap penulis wacana tersebut terhadap permasalahan korupsi di Indonesia. Secara struktural, wacana (11) dibangun oleh beberapa kalimat berita. Dengan demikian, tentunya isi wacana tersebut menyampaikan informasi tentang masalah korupsi di Indonesia.

Di balik kalimat berita tersebut, penulis wacana (11) ingin menyampaikan dan menggarisbawahi dengan tinta tebal bahwa lembaga terkorup di Indonesia adalah kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengadilan. Sesuatu yang ironis ingin ditunjukkan oleh penulis bahwa lembaga terkorup di Indonesia justru dipegang oleh lembaga penegak hukum. Hal lain yang ingin disampaikan penulis adalah survei itu sah, sehingga tidak perlu diperdebatkan atau ditanggapi dengan reaksi yang berlebihan. Dalam kasus ini, Polri tidak perlu meminta maaf. DPR juga tidak perlu meradang. Ka-

laupun Polri meminta maaf, pernyataan maaf dari Polri diharapkan sebagai permintaan maaf yang keluar sebagai ekspresi niat untuk memperbaiki diri tanpa embel-embel klausa “jika hasil survei itu terbukti benar”.

- (12) Kalau ingin “selamat”, sebaiknya PKS tidak perlu berhadapan dengan KPK.
 (13) Di dasawarsa kedua perjuangannya, KPK harus mengajak lembaga lain “masuk surga” setidaknya berupa meraih kehormatan dan respek rakyat.

Data (12) dan (13) merupakan penggalan wacana dalam editorial pada surat kabar. Editorial tersebut diberi judul *Sia-sia Melawan KPK dan KPK Jangan Masuk Surga Sendirian*. Dalam editorial tersebut penulis jelas-jelas mendukung KPK ketika berseberangan dengan PKS dalam masalah dugaan penyuaapan impor daging sapi. Dalam data (12) bahkan penulis berpendapat *kalau ingin “selamat”, sebaiknya PKS tidak perlu berhadapan dengan KPK*. Penulis memperingatkan PKS untuk tidak melawan KPK. Penggunaan kata *selamat* dalam wacana tersebut dapat dimaknai sebagai ancaman serius terhadap PKS dari masyarakat untuk tidak memilih PKS ketika masih melawan KPK karena masyarakat tentu ada di balik kerja KPK. KPK selalu dapat membuktikan tuduhnya terhadap para pelaku tindak korupsi. Oleh karena itu, pada data (13) penulis mengatakan bahwa KPK harus mengajak lembaga lain “masuk surga” karena KPK telah melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil menekan korupsi di Indonesia, meskipun sampai saat ini tindak kejahatan korupsi tetap masih ada. Selama ini, KPK berjuang sendirian melawan korupsi di Indonesia. Sementara, lembaga lain masih belum selesai membersihkan dirinya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan beberapa penelitian dengan pendekatan analisis wacana kritis, antara lain yang dilakukan oleh Subagyo (2012). Subagyo

meneliti “Bingkai dalam Wacana Tajuk tentang Terorisme: Kajian Pragmatik Kritis atas Editorial Suara Pembaharuan dan *Republika*”. Dalam penelitian tersebut, dibahas apa, bagaimana, dan mengapa bingkai (*frame*) dan pbingkaian (*framing*) dalam wacana tajuk tentang terorisme *Suara Pembaharuan dan Republika*. Di samping itu, peneliti juga menawarkan pendekatan atau model kajian wacana secara “pragmatik kritis” sebagai paduan pragmatik dan analisis kritis. Sesuai dengan pendekatan pragmatik kritis, metode analisis data yang digunakan mencakup metode padan pragmatik dan model analisis kognisi sosial. Adapun hasil penelitiannya adalah kedua surat kabar tersebut menggunakan bingkai yang berbeda. Perbedaan bingkai tersebut dipengaruhi oleh latar belakang dua institusi media tersebut. Selain itu, kedua media tersebut melakukan pbingkaian dengan memanfaatkan tujuan tuturan dan sasaran tutur wacana tajuk tentang terorisme. Kesamaan tujuan tutur (mengajak, mendorong, dan mengkritik) memperlihatkan tujuan tutur dijadikan ‘arena bertanding’ untuk berperang opini.

SIMPULAN

Dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, *Koran Tempo* dalam dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kegagalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk bui.

Dengan bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar *Kompas*, *Republika*, *Koran Tempo*, *Jawa Pos*, dan *Suara Merdeka* memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel merupakan salah satu luaran penelitian Desentralisasi skim Hibah Fundamental tahun 2013. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua LP2M Unnes, dan para *reviewer*, yakni Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd. dan Prof. Dr. M. Jazuli, M.Hum. yang telah berkenan menyeleksi, memberi masukan, dan menilai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asher, R.E dan J.M.Y Simpson (Eds). 1994. *The Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 2*. Oxford: Pergamon Press.
- Baryadi, Parptomo. 2002. *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Bolivar, A. 1994. "The Structure of Newspaper Editorials" dalam M. Coulthard (ed.). *Advances in Written Text Analysis*. London: Routledge, Hlm. 276-294.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N dan Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis: An Overview" dalam Teun van Dijk (ed). *Discourse and Interaction*. London: Sage Publications, 67-97.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan*. Terjemahan Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Publik di Media Massa sebuah Studi Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Granit.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koesworo, F.X, Y.B Margantoro, dan R.S Viko. 1994. *Di Balik Tugaskuli Tinta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusatama.
- Leech. Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terj. M.D.D Oka. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Renkema, J. 2004. *Introduction to Discourse Studies*. Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Santana, K. S. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Obor.
- Suara Merdeka. 2011. "RI 'Juara' Korupsi Asia Tenggara", *Suara Merdeka*, 15 Juni 2011, hal.1
- Subagyo, Paulus Ari. 2010. "Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis" dalam *Jurnal Linguistik Indonesia*, Tahun ke-28, Nomor 2, Agustus 2010, hal. 177-187.
- Subagyo, Paulus Ari. 2012. "Bingkai dalam Wacana Tajuk tentang Terorisme: Kajian Pragmatik Kritis atas Editorial Suara Pembaharuan dan Republika". Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Subrata. 1997. "Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Media Massa: Pendekatan Empiris" dalam Sudaryanto dan Sulistyono (eds.). *Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Citra Almamater, hal. 65 - 75.
- Subroto, D. Edi. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 1997. "Ragam Jurnalistik Bahasa Indonesia sebagai Ragam Kreatif: Posisinya di antara Ragam-ragam Kreatif yang Lain serta Prospeknya pada Abad XXI" dalam Sudaryanto dan Sulistyono (eds.). *Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Citra Almamater, hal. 43-63.